

**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

---

**BAB I Pendahuluan**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

- 1) Untuk menginformasikan kepada Pimpinan (Walikota) tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Ketenagakerjaan ;
- 2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan/dikelola;
- 3) Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang.

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum yang menjadi landasan di dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah:

1. Undang-undang Nomor nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang LKPD dan LKIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/795/B.3/19 tanggal 31 Agustus Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari 6 bab, penjelasan dari masing-masing bab sebagai berikut:

- 1). Bab I, Pendahuluan terdiri atas 3 sub bab yaitu maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan; landasan hukum penyusunan laporan keuangan; dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;
- 2). Bab II, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Dinas Ketenagakerjaan. Bab ini terdiri dari 3 sub bab masing-masing ialah: Ekonomi makro; Kebijakan Keuangan serta Indikator pencapaian target kinerja.
- 3). Bab III, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Ketenagakerjaan. Terdiri dari 2 sub bab yaitu Ikhtisar realisasi target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 4). Bab IV, Kebijakan Akuntansi terdiri 4 (empat) sub bab diantaranya adalah entitas akuntansi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang; Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan; serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
- 5) Bab V, Penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Terdiri dari 2 sub bab yaitu Rincian penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan dan Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan

basis akrual atas belanja. Pos-pos yang dirinci tersebut antara lain pendapatan, belanja, aset, kewajiban, serta ekuitas dana.

6) Bab VI, Penutup

## **BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Kegiatan**

### **2.1 Ekonomi Makro**

- Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
- Visi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah *"Ketenagakerjaan Terkendali, Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan"*, sedangkan Misi Dinas Ketenagakerjaan :
  - ✦ Meningkatkan Kemampuan, Pengetahuan dan Keterampilan Tenaga Kerja
  - ✦ Mengupayakan Peningkatan Kesempatan kerja
  - ✦ Meningkatkan Hubungan Industrial, Perlindungan Tenaga Kerja dan Penegakan Hukum
- Dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, maka pembangunan dibidang Ketenagakerjaan harus mencerminkan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh dan keluarganya serta mengatur pula perlindungan terhadap pengusaha.
- Keterkaitan pembangunan bidang Ketenagakerjaan tidak hanya melalui kepentingan tenaga kerja sebelum,selama dan sesudah kerja,tetapi juga mempunyai dimensi keterkaitan dengan kepentingan pengusaha,pemerintah dan masyarakat maka diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia,pengantar produktifitas dan daya saing tenaga kerja,serta upaya perluasan kesempatan kerja.

### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari APBD Kota

Tangerang sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) berupa Gaji dan Tunjangan Pegawai dengan anggaran murni sebesar Rp. 11.836.944.950,00 dan pada perubahan anggaran menjadi Rp. 11.280.131.735,00 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 556.813.215,00 pengurangan anggaran BTL ini disebabkan karena adanya beberapa pegawai yang pensiun maupun mutasi ( Struktural sebanyak 2 orang dan fungsional umum sebanyak 3 orang). Untuk Belanja Langsung (BL) anggaran murni sebesar Rp.10.262.805.288,00 dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.11.571.579.121,00 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.1.308.773.833,00 dikarenakan adanya perubahan anggaran pada 11 kegiatan ,yaitu 2 kegiatan mengalami penurunan anggaran dan 8 kegiatan terjadi kenaikan anggaran, serta adanya penambahan 1 kegiatan baru. Untuk Tahun Anggaran 2018 Total anggaran BL dan BTL menjadi sebesar Rp.22.851.710.856,00 yang mencakup 3 urusan, yaitu Urusan Tenaga Kerja, Urusan Komunikasi dan Informasi dan Urusan Perencanaan, serta dialokasikan kedalam 9 Program dan 51 Kegiatan.

Berikut rincian dari Program dan Kegiatan Belanja Langsung Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2018 :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai anggaran sebesar Rp.5.620.602.324,00 yang terdiri dari 13 ( tiga belas ) kegiatan :**
  - a. Jasa Surat Menyurat sebesar Rp.5.620.602.324,00
  - b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik sebesar Rp.680.483.
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp 23.450.00000;
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 694.218.000;
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 188.336.000,00;
  - f. Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 106.026.000,00;
  - g. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 10.000.000,00;
  - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 314.302.824,00;

- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 14.040.000,00;
  - j. Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 119.990.000,00;
  - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebesar Rp. 1.020.685.000,00;
  - l. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran , sebesar Rp.388.118.000,00;
  - m. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor sebesar Rp 2. 025.048.000,00;
  - n. Digitalisasi Kearsipan SKPD sebesar Rp. 33.205.000,00
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki anggaran sebesar Rp 1.206.209.800,00 yang terdiri dari (lima) kegiatan :**
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, sebesar Rp. 373.122.500,00;
  - b. Pengadaan Meubelair, sebesar Rp.98.714.200,00;
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp 287.116.100,00;
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 291.8000.000,00;
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor sebesar Rp 155.457.000,00.
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Memiliki anggaran sebesar Rp 29.850. 000,00 untuk membiayai 1 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD.**
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**  
Memiliki anggaran sebesar Rp 260.786.575,00 yang terdiri dari 3 (tiga ) kegiatan :
- a. Pemeliharaan ISO, dengan anggaran sebesar Rp.120.600.000.000;
  - b. Penyusunan SOP SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
  - c. Pengelolaan Data Dan Informasi Ketenagakerjaan, dengan Anggaran sebesar Rp.90.186.575,00

**5. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.**

Memiliki anggaran sebesar Rp. 2.572.371.522,00 Terdiri dari 12 (dua belas) Kegiatan, yaitu :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi, sebesar Rp. 1.276.127.500,00 bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Las, Montir Mobil Bensin, Montir Sepeda Motor, Teknik Pendingin ,Pelatihan Security,Pelatihan Komputer dan Pelatihan Perhotelan.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi pencari kerja, sebesar Rp 613.316.000,00 bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang mempunyai potensi dibidang menjahit pakaian.
- c. Penyusunan dan Analisa Kebutuhan Pelatihan Kerja / TNA (Training Need Analysis), sebesar Rp.54.480.800;
- d. Pengendalian ,Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelatihan Kerja di UPTD BLK, sebesar Rp.18.100.000,00;
- e. Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan pada LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) , sebesar Rp.37.407.400;
- f. Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Pelatihan Kerja (SIMPELKERJA), sebesar Rp. 24.440.000,00 bentuk kegiatannya yaitu pembuatan software SIMPELKERJA yang bertujuan untuk mengkoordinasikan hasil pelatihan di UPTD BLK dan LPK Swasta.
- g. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas pada Unit Kerja, sebesar Rp.40.675.300,00;
- h. Bimbingan Teknis Kader Produktivitas, sebesar Rp.46.878.600,00
- i. Fasilitasi Konsultasi Peningkatan Produktivitas Kepada Perusahaan, sebesar Rp.61.404.500,00;

- j. Promosi dan Peningkatan Produktivitas, sebesar Rp.30.214.500,00;
- k. Fasilitasi Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi dan Kompetensi, sebesar Rp.87.159.200,00;
- l. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, sebesar Rp.282.167.722,00;

**6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.**

Memiliki anggaran sebesar Rp.727.662.500,00 yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan :

- a. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja , sebesar Rp 155.507.500,00 tujuan kegiatan ini untuk melakukan kegiatan laporan informasi pasar kerja.
- b. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja sebesar Rp 351.970.500,00 bentuk kegiatan ini adalah menyelenggarakan bursa kerja (Job Fair) Tingkat Kota pada bulan selama 3 Hari bertempat di Metropolis Town Square Kota Tangerang, dan Job Fair di Tingkat Kecamatan sebanyak 2 kali yaitu di kecamatan Jatiuwung dan Kecamatan Cipondoh, dan juga Kegiatan Pameran Festival Cisadane.
- c. Fasilitasi Perpanjangan IMTA dan Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing sebesar Rp 20.967.500,00 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpanjangan IMTA dan Laporan Keberadaan Tenaga Asing di Kota Tangerang.
- d. Pengendalian ,Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri, sebesar Rp.8.500.000,00;
- e. Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sebesar Rp.33.825.000,00;
- f. Fasilitasi Pemberdayaan/Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri Menjadi Wira Usaha Baru sebesar Rp. 72.500.000,00 Kegiatan ini berupa Pelatihan Bisnis Online

yang diikuti oleh 60 orang peserta ( 30 orang x 2 kegiatan) dan bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru dan mengurangi angka pengangguran di Kota Tangerang.

- g. Fasilitasi Pemberdayaan/Pengembangan Teknologi Tepat Guna, sebesar Rp. 84.392.000,00;

#### **7. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.**

Memiliki anggaran sebesar Rp. 1.019.771.400,00 terdiri dari 6( enam) kegiatan , yaitu :

- a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebesar Rp 75.800.200.00 bertujuan untuk melakukan kegiatan pemerantaraan/mediasi dalam rangka penanganan kasus perselisihan hubungan industrial yang ada di Kota Tangerang;
- b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar Rp 493.775.000,00 bentuk dari kegiatan ini antara lain melaksanakan kegiatan rapat/pertemuan LKS Tripartit dan Depeko, serta melakukan monitoring pengupahan ke perusahaan di Kota Tangerang ;
- c. Fasilitasi Penanganan Penyelenggaraan Hari Buruh Nasional (Mayday) sebesar Rp 298.737.200,00 tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memonitor dan memfasilitasi pelaksanaan Hari Buruh Nasional (MayDay) yang dilaksanakan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja di Kota Tangerang dalam bentuk hiburan dan berbagai macam perlombaan agar pelaksanaan May Day dapat berjalan dengan aman, tertib dan damai, sehingga tidak terjadi aksi sweeping dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh pekerja;
- d. Fasilitas Pembuat Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebesar Rp 5.600.000,00. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan kelangsungan usaha bagi pengusaha dan ketenangan kerja bagi pekerja pada perusahaan agar situasi kerja tetap kondusif, memperjelas hak dan kewajiban antara pekerja



dan pengusaha serta terciptanya PP dan PKB yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar Rp 95.859.000,00 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan perundang-undangan ketenagakerjaan bagi para pekerja dan pengusaha.
- f. Fasilitasi Penanganan Unjuk Rasa/Mogok Kerja, sebesar Rp.50.000.000,00

#### **8. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**

Memiliki anggaran sebesar Rp 74.500.000,00 untuk membiayai 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Kerjasama Advetorial dengan Media Masa Lokal, Regional dan Nasional.

#### **9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Memiliki anggaran sebesar Rp.59.825.000,00 terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) sebesar Rp. 10.175.000,00
- b. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sebesar Rp. 49.650.000,00.

Program nomor 1, 2 dan 3 merupakan bagian dari Program 1-14 yaitu yang dilaksanakan pada setiap SKPD sebagai unsur penunjang kegiatan/urusan semua SKPD. Untuk program nomor 4 sampai dengan nomor 8 merupakan Program Urusan Wajib Tenaga Kerja.

Di Tahun Anggaran 2018 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang memiliki total anggaran Rp 22.851.710.856,00 yang dialokasikan ke dalam 2 (dua) jenis belanja yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp 11.280.131.735,00 dan belanja langsung sebesar Rp 11.571.579.121,00 untuk membiayai sebanyak 9 Program dan 51 Kegiatan, dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2018. Dari ke 2 (dua) jenis belanja tersebut dialokasikan lagi ke dalam 2 jenis belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dengan rincian sebagai berikut :

- ♣ Belanja Pegawai memiliki anggaran sebesar Rp 11.763.481.735,00 dan sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 11.680.278.185,00 (99,29%)
- ♣ Belanja Barang memiliki anggaran sebesar Rp 10.132.004.547,00 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 9.677.420.537,00 (95,51%)
- ♣ Belanja Modal memiliki anggaran sebesar Rp 956.224.574,00 dan sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 688.412.067,00 (71,99%).

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Persentase realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 96,47 %

Dari 9 (sembilan) program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan yang dialokasikan dalam DPPA Dinas Ketenagakerjaan TA 2018. Berikut Tingkat penyerapan realisasi keuangan terhadap anggaran pada setiap program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

#### ➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 14 kegiatan, sampai dengan 31 Desember 2018 presentase penyerapan anggaran mencapai 95,69%, nilai presentase terendah yaitu pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terealisasi sebesar 68,92 %, hal ini di sebabkan karena Kegiatan ini direalisasikan real cost, dan sisa anggaran adalah untuk antisipasi bila terjadi lonjakan atau kenaikan pemakaian / untuk antisipasi adanya kenaikan pembayaran listrik.

#### ➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 5 kegiatan, sampai dengan 31 Desember 2018 presentase penyerapan anggaran mencapai 70,61%, dimana presentase penyerapan anggaran dari 5 kegiatan diatas masing masing sebesar 39,28 %, 99,33 %, 99,80%, 92,99% dan 73,25 %.

Presentasi Penyerapan terendah pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sebesar 39,28%, hal ini

dikarenakan adanya kendala pada pihak ketiga yang kurang pemahamannya tentang pengadaan barang jasa, sehingga ada sebagian anggaran yang tidak bisa direalisasikan.

➤ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, yaitu Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD dan sampai dengan 31 Desember 2018 penyerapan anggaran mencapai 93,80 %.

➤ Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pada Program ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan ,realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 92,74 %. Adapun realisasi dari masing-masing kegiatan sebesar 93,90 %, 99,35 % dan 87,53 %.

➤ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program ini terdiri dari 12 Kegiatan dan sampai 31 Desember 2018 realisasi penyerapan anggaran mencapai 95,21%

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi terealisasi sebesar 98,23%
2. Kegiatan Pendidikan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Pencari kerja terealisasi sebesar 98,78%.
3. Penyusunan dan Analisa Kebutuhan Pelatihan Kerja/TNA terealisasi sebesar 57,78%
4. Pengendalian ,Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelatihan Kerja di UPTD BLK, terealisasi sebesar 84,81%
5. Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan pada LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), terealisasi sebesar 80,98
6. Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Pelatihan Kerja (SIMPELKERJA), terealisasi sebesar 88,50%
7. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas pada Unit Kerja, terealisasi sebesar 61,09%
8. Bimbingan Teknis Kader Produktivitas,teralisasi sebesar 88,96%

9. Fasilitasi Konsultasi Peningkatan Produktivitas Kepada Perusahaan, terealisasi sebesar 78,99%
10. Promosi dan Peningkatan Produktivitas, terealisasi sebesar 74,39%
11. Fasilitasi Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi dan Kompetensi, terealisasi sebesar 88,01%
12. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, terealisasi sebesar 98,06%

➤ Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan ,sampai 31 Desember 2018 presentase penyerapan anggaran sebesar 98,51% . Penyerapan anggaran pada Program ini cukup tinggi, Rata-rata penyerapan anggaran pada setiap kegiatan mencapai diatas 98,00%.

➤ Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Pada Program ini terdiri dari 6 (enam)kegiatan, sampai dengan 31 Desember 2018 presentase penyerapan anggaran sebesar 98,45%.

➤ Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

Pada Program ini terdiri dari 1 kegiatan sebesar Rp.74.500.000 dan sampai dengan 31 Desember 2018 , Penyerapan anggaran 98,66 %

➤ **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, Penyerapan Anggaran sebesar 76,58 %.

Pada Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan Yaitu Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD terealisasi sebesar 72,78% dan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terealisasi sebesar 95,,09%

### **BAB III . Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

#### **3.1 Ikhtisar Realisasi Target Kinerja Keuangan**

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mempunyai Anggaran Belanja pada Tahun 2018 sebesar Rp 22.851.710.856,00 dan

sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp 22.046.110.789,00 (96,47 %). Berikut persentase realisasi yang telah tercapai untuk masing-masing program yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Di dalam program ini memuat kegiatan-kegiatan rutin dalam menunjang kelancaran dan meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran dan sampai dengan 31 Desember 2018 telah mencapai 95,69%
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Tujuan dari program ini adalah untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan demi kelancaran pelayanan dan pekerjaan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi mencapai 70,61%;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Tujuan dari Program ini adalah untuk Meningkatkan kemampuan aparatur atau peningkatan sumber Daya Manusia dalam Pengoperasian Komputer, sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi sebesar 93,80 %
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Tujuan dari program ini adalah melakukan penyusunan dan pelaporan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja dan keuangan , yaitu Pemeliharaan ISO serta Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pengelolaan Data Informasi Ketenagakerjaan, sampai 31 Desember 2018 realisasi telah mencapai 92,74%;
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.  
Tujuan dari program ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja baik berbasis wirausaha maupun kompetensi, seperti program pelatihan menjahit pakaian, montir sepeda motor, montir mobil bensin, las, teknik pendingin, Pelatihan Perhotelan, Pelatihan Komputer dan pelatihan Satpam serta sampai dengan 31 desember 2018 realisasi anggaran mencapai 95,21%;

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja.  
Tujuan dari program ini adalah menyediakan atau menginformasikan lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja, serta mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi para pencari kerja agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Di tahun 2018 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengadakan Bursa Tenaga Kerja (*Job Fair*) secara gratis yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dan diadakan sosialisasi Bursa Kerja Kusus (BKK) sebanyak 60 orang ( 30 orang x 2 kegiatan) yang diikuti oleh guru/humas yang membidangi BKK di SMK dengan tujuan agar sekolah mempunyai wadah untuk menyalurkan siswa/siswinya untuk memasuki dunia kerja. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang juga melakukan pembinaan kepada PPTKIS, pencari kerja dan masyarakat Kota Tangerang agar memahami mekanisme penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri sehingga semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi telah mencapai 98,51%;
  
- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.  
Ada beberapa tujuan dari program ini, karena kelompok sasaran dari kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program ini melibatkan unsur pekerja dan pengusaha. Tujuan dari program ini antara lain : terselenggaranya fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan , Penanganan Penyelenggaraan Hari buruh Nasional (Mayday) ,Penanganan Unjuk Rasa dan Pembuatan Peraturan Perusahaan(PP) serta Perjanjian Kerja Bersama(PKB) sesuai aturan yang berlaku. Pada Program ini sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 98,45%.
  
- Program Kerjasama Informasi dan Media Massa  
Tujuan dari program ini adalah agar masyarakat Kota Tangerang mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan

dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 98,66%.

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tujuan dari program ini adalah untuk Penyusunan LKIP dan Renstra Renja SKPD sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 76,58%.

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan ada beberapa hambatan/kendala, sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Program ini sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi sebesar 95,69 %. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program ini Dinas Ketenagakerjaan tidak mengalami kendala. Sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan kegiatan-kegiatan seperti Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dibayarkan realcost dan tidak bisa diprediksi secara tepat . dan sisa anggaran dari kegiatan lain sebagai efisiensi anggaran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sampai 31 Desember 2018 realisasi mencapai 70,61%, dalam pelaksanaan pada 5 kegiatan di program ini, terdapat satu kendala pada Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor yang hanya terealisasi sebesar 39,28%, dikarenakan kurangnya pemahamann dari pihak ketiga tentang pengadaan barang dan jasa , sehingga sebagian kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Pada Program ini sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 93,80%, tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, sisa anggaran yg tidak terealisasi adalah efisiensi anggaran.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Program ini sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi mencapai 92,74%; Kegiatan Data Informasi Ketenagakerjaan, Kegiatan Pemeliharaan ISO anggaran tidak terealisasi yaitu Belanja Honorarium Tenaga Ahli /Nara sumber Non PNS.

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Pada Program ini sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi mencapai 95,21%; Dalam pelaksanaan kegiatan ini pada program ini tidak mengalami kendala dan semua kegiatan dilaksanakan dengan baik, sisa anggaran yang tidak teralisasi dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi dan Kegiatan Keterampilan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja, yaitu anggaran nara sumber/ instruktur, dikarenakan untuk efisiensi anggaran menggunakan tenaga instruktur dari pegawai Disnaker, dan dari anggaran uang transport peserta yang direalisasikan realcost sesuai kehadiran peserta.

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Sampai dengan 31 Desember 2018 telah mencapai 98,51%. Pelaksanaan kegiatan pada program ini tidak mengalami kendala yang berarti dan sisa anggaran dikarenakan semua kegiatan direalisasikan sesuai kebutuhan untuk efisiensi anggaran.

- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Pada Program ini realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 mencapai 98,45%. Pada Program ini kegiatan dilaksanakan dengan baik dan tidak mengalami kendala, sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk efisiensi anggaran.

- Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Pelaksanaan Kegiatan pada program ini tidak mengalami hambatan, sampe 31 Desember 2018 terealisasi mencapai 98,66% .

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Kegiatan pada program ini terealisasi sebesar 76,58 %. Pada Kegiatan Penyusunan Restra dan Renja SKPD penyerapan anggaran sebesar 72,78%. Hal ini dikarenakan ada efisiensi anggaran pada belanja cetak dan penggandaan,



serta belanja Narasumber/Tenaga Ahli PNS dan Non PNS , transportasi dan Akomodasi Narasumber PNS dan Non PNS sebagian tidak teralisasi.

## **BAB IV Kebijakan Akuntansi**

### **4.1 Entitas Akuntansi**

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang selaku Entitas Akuntansi harus bertanggungjawab atas penggunaan dana/ anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara transparan dan akuntabel, antara lain dengan menyusun Laporan Keuangan yang disampaikan kepada pimpinan (Walikota) sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat 6.

### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sistem Akuntansi menggunakan **basis Akrua**l . Atas dasar basis basis akrual tersebut pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi walaupun belum ada kas yang diterima, sedangkan belanja diakui pada saat belanja itu dibayar. Pada akhir periode, dilakukan penyesuaian (*adjustment*) atas transaksi keuangan periode berjalan untuk menentukan saldo akhir akun dalam Neraca maupun Laporan Pendapatan dan Belanja berdasarkan basis akrual.

### **4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan adalah:

- Kas  
Kas adalah saldo uang kas tunai yang ada di Kasir Bendahara Pengeluaran dan uang yang ada di rekening bank Bendahara Pengeluaran.
- Persediaan  
Persediaan dinilai berdasarkan Inventarisasi Fisik pada akhir Periode Akuntansi. Dengan menggunakan Metode FIFO
- Aset  
Aset dinilai berdasarkan Biaya Perolehan (Harga Beli + Biaya Lainnya)

### **4.4 Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan**

#### 4.4.1 Kebijakan Umum

- ❖ Kebijakan Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Disnaker Tahun Anggaran 2018 secara umum mengacu kepada PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2008 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Tangerang.
- ❖ Siklus akuntansi Dinas Ketenagakerjaan meliputi urutan-urutan kegiatan sebagai berikut:
  - a) mencatat anggaran dalam catatan akuntansi
  - b) mencatat transaksi keuangan yang terjadi selama periode berjalan
  - c) melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode
  - d) membuat jurnal penutup
  - e) membuat jurnal pengakuan aset (Jurnal Kololari)
  - f) menyiapkan Laporan Keuangan
- ❖ Sistem akuntansi Dinas Ketenagakerjaan mengacu kepada Sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang menggunakan dasar pembukuan jurnal berpasangan. Pembukuan jurnal berpasangan didasarkan pada persamaan akuntansi yang mendasar sebagai berikut :  $Aktiva = Utang + Ekuitas$
- ❖ Persamaan akuntansi ini menyatakan posisi keuangan suatu entitas pada suatu saat tertentu. Setiap kali sebuah transaksi diproses dan dibukukan, keseimbangan antara aktiva dengan kewajiban ditambah ekuitas akan selalu dipertahankan. Jadi setiap perubahan dalam posisi keuangan akan selalu mempengaruhi kedua sisi persamaan itu.

#### 4.4.2 Kebijakan Per Akun

##### 1. Aset Lancar

- a) *Kas di Bendahara Pengeluaran*

Kas di bendahara pengeluaran adalah semua saldo uang kas tunai yang ada di Kasir Bendahara Pengeluaran dan uang yang ada di rekening bank Bendahara Pengeluaran. Kas diakui pada saat diterima dan dikeluarkan dan dicatat berdasarkan nilai nominal uang.

*b) Persediaan*

Persediaan adalah barang pakai habis atau material yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Persediaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dinilai pada akhir periode pembukuan.

## **2. Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud (fisik) yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, untuk digunakan dalam kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, yang diperoleh melalui pembelian dan hibah/donasi.

Penilaian Aset Tetap dilakukan sebagai berikut:

- \* Aset Tetap yang diperoleh dengan cara dibeli, dinilai dengan harga perolehan yang terdiri atas semua pengeluaran kas dan setara kas yang diperlukan untuk mendapatkan hak atas aktiva, ditambah biaya lainnya untuk menempatkan aktiva tersebut dalam keadaan dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- \* Perbaikan dan pemeliharaan, dimaksudkan untuk mengembalikan Aset Tetap kepada kondisi semula. Biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan dikategorikan sebagai belanja barang dan jasa.
- \* Aset Tetap akan dihapus apabila rusak berat, usang, hilang atau dijual yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota atas persetujuan DPRD.

Aset Tetap yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang terdiri dari :

*a) Tanah*

Tanah adalah Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan digunakan untuk Kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

b) Peralatan dan Mesin

1) Alat Angkutan

Alat Angkutan adalah alat angkutan yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah, yang diperoleh melalui pembelian, hibah/donasi, pertukaran dengan aktiva lainnya. Nilai Alat Angkutan diukur dan dicatat sebesar harga perolehan yaitu jumlah harga pembelian dan biaya lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan kendaraan sehingga dapat digunakan.

2) Alat Bengkel

Alat bengkel adalah peralatan bengkel yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan yang digunakan untuk kegiatan pelatihan keterampilan kerja (BLK) yang diperoleh melalui pembelian. Nilai Alat bengkel diukur dan dicatat sebesar harga perolehan yaitu jumlah harga pembelian dan biaya pemasangan serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan tersebut sehingga dapat dipergunakan.

3) Alat Ukur

Alat ukur yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berupa 1 unit alat ukur yaitu GPS (GPS with voice assistance guide).

4) Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah alat kantor dan rumah tangga yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga diukur dan dicatat sebesar harga perolehan yaitu jumlah harga pembelian dan biaya pemasangan serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan tersebut sehingga dapat dipergunakan.

5) Alat Studio dan Alat Telekomunikasi

Alat Studio dan Alat Telekomunikasi adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

6. Alat Pertanian

Alat Pertanian adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Alat Pertanian berupa mesin pemotong rumput

c) Bangunan Gedung

Bangunan Gedung adalah bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh dinas Ketenagakerjaan dan dipergunakan untuk kegiatan pada dinas Ketenagakerjaan.

❖ **Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah Aset yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang selain Aset Tetap. Aset ini adalah Aset Tetap tidak berwujud yaitu berupa software data base tenaga kerja daerah. Yang mempunyai nilai sebesar Rp. 157.060.000,00

❖ **Ekuitas Dana**

Ekuitas menggambarkan kelebihan aset dari kewajiban serta menginformasikan akumulasi defisit dan surplus yang belum dialokasikan, akumulasi dana yang ditanamkan dalam aset tetap dan aset lainnya serta ekuitas dana lancar.

Akun ini dikelompokkan berdasarkan sifat pemanfaatannya yaitu terdiri dari :

a) Ekuitas Dana Lancar

- Cadangan Piutang Lainnya
- Cadangan Persediaan

- b) Ekuitas Dana Investasi
  - Dana diinventasikan pada aset tetap
  - Dana diinvestasikan pada aset lainnya
- c) Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasi

Ekuitas dana untuk dikonsolidasi ini adalah Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK-PPKD) yaitu diantaranya : pendistribusian aset ke tiap-tiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

#### **4.4.3 Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) disusun berdasarkan rekening Pendapatan dan belanja dan rekening neraca sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 yang kemudian untuk struktur rekening Laporan Realisasi Anggaran (Belanja) dikonversi berdasarkan rekening Belanja sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah (SAP), dengan mekanisme konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis nomor 4 tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang (LRA dan Neraca) disusun berdasarkan transaksi-transaksi Buku Besar rekening Pendapatan/Belanja dan buku besar rekening Neraca dan telah didukung dengan bukti-bukti dasar/bukti pembukuan yang memadai.

### **BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan**

#### **5.1 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun melalui Kertas Kerja Konversi dari rekening menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah ke rekening menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan

hasil konversi sebagaimana terdapat pada *lampiran I*. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang hanya terdiri dari belanja saja antara lain :

❖ **Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja operasi terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 31 Desember 2018		Selisih Lebih/(kurang)
			Rp.	%	
1	Belanja Pegawai	11,763,481,735.00	11,680,278,185.00	99.29	83,203,550.00
2	Belanja Barang dan jasa	10,132,004,547.00	9,677,420,537.00	95.51	454,584,010.00
	<b>Jumlah</b>	<b>21,895,486,282.00</b>	<b>21,357,698,722.00</b>	<b>97.54</b>	<b>537,787,560.00</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2018 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp21.357.698.722 ,00 sedangkan total anggaran untuk Belanja Operasi Tahun 2018 sebesar Rp 21.895.486.282,00 sehingga sisa anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp 537.787.560,00. Jika dihitung dengan persentase realisasi yang sudah tercapai sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar 97,54%.

♣ **Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.763.481.735,00, dialokasikan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (Belanja tidak langsung) sebesar Rp 11.280.131.735,00 (95,90%) dan untuk pembayaran honorarium pegawai baik PNS maupun Non PNS (Belanja Langsung) sebesar Rp 483.350.000,00 ( 4,11% ) dengan rincian sebagaimana terdapat pada Laporan Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Ketenagakerjaan .

♣ **Belanja Barang dan Jasa telah terealisasi sebesar Rp 9.677.420.537,00 (95,51%) digunakan untuk pembayaran belanja Bahan Habis pakai (ATK, dll), Cetak dan Penggandaan, Perjalanan Dinas, Pemeliharaan Aset Tetap Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang (AC, Komputer, Kendaraan, Gedung, Printer, Mesin Tik ) dan Belanja Modal (Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Alat-**

alat Studio dan Komunikasi) yang teralokasi pada 48 (empat puluh delapan ) kegiatan.

❖ **Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2018 anggaran dan realisasi belanja modal Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 31 Desember 2018		Selisih Lebih/(kurang)
			Rp.	%	
1	Belanja Peralatan dan Mesin	913,324,574.00	688,412,067.00	75.37	224,912,507.00
2	Belanja Gedung dan Bangunan	42,900,000.00	-	-	42,900,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>956,224,574.00</b>	<b>688,412,067.00</b>	<b>71.99</b>	<b>224,912,507.00</b>

Berdasarkan tabel di atas pada tahun anggaran 2018 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang memiliki anggaran Belanja Modal sebesar Rp 956.224,574,00. Dan sampai dengan 31 Desember 2018 semua kegiatan pengadaan yang berkaitan dengan belanja modal seluruhnya telah dilaksanakan dengan jumlah realisasi sebesar Rp.688.412.067,00 (71,99%). Anggaran Belanja Modal di alokasikan pada 5 kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi Rp.184.775.300, Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor terealisasi Rp. 146.559.000, Kegiatan Pengadaan Meubelair terealisasi Rp.98.057.000, Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor realisasi Rp. 0,- Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja terealisasi sebesar Rp.259.020.767,00

**5.2 Neraca**

Neraca disusun berdasarkan neraca awal yang diperoleh dari Neraca tahun lalu dan ditambah dengan pengadaan tahun sekarang.

Pos-pos neraca terdiri dari :

**a) ASET**



Aset Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 11.914.803.798,54** yang terdiri dari :

❖ **Aset Lancar**

Jumlah pada akun aset lancar merupakan nilai aset lancar yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang per tanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp 5.563.000,00** yang terdiri dari :

1. Kas

Pos Kas ini mencatat jumlah uang baik yang ada di Brankas Bendahara Pengeluaran maupun yang ada di Rekening Giro Bank Jabar (nomor rekening 0120030041852). Jumlah saldo Kas per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

➤ Brankas	Rp 0,00
➤ Bank (Giro)	Rp0,00
Jumlah Kas	<u>Rp 0,00</u>

2. Persediaan

Pos persediaan ini merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 2 (dua) semester. Saldo persediaan ini merupakan hasil stock opname yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang di 31 desember 2018 pada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai Persediaan hasil opname fisik persediaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah sebesar Rp 5.563.000,00

❖ **Aset Tetap**

Akun aset tetap merupakan nilai aset tetap yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sampai dengan 31 Desember 2018, baik yang diperoleh dari hasil pengadaan sendiri maupun yang diperoleh dari Pemerintah Kota Tangerang (DPKD ataupun Instansi Lainnya) dengan jumlah nilai Aset Tetap sebesar **Rp. 11.840.420.798,54**

Nilai aset tetap Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tersebut dicatat sebesar nilai perolehan, yang merupakan akumulasi dari Tahun 2003 melalui inventarisasi dan penilaian yang dilakukan pihak ketiga (appraisal) sampai dengan 31 Desember 2018 tanpa memperhitungkan penyusutan, nilai aset tersebut terdiri dari:

1. Tanah

Berdasarkan keputusan Walikota Tangerang Nomor: 028/Kep.285-DPKD/2011 tentang penetapan status pengguna barang milik pemerintah Kota Tangerang bahwa aset tanah yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan II No.3 mutasi dari DPKD dengan ukuran 4500 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar **Rp. 2.250.000.000,00**

2. Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap untuk peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp 7.792.959.677,41** terdiri dari :

- Alat Angkutan

Alat Angkutan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berupa alat angkutan darat bermotor kendaraan roda dua sebanyak 27 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 12 unit. Nilai asset alat angkutan sampai dengan 31 Desember 2018 senilai Rp 2.245.642.813,00 terjadi mutasi aset kurang sebesar Rp. 233.137.668,00 dan mutasi tambah sebesar rp.305.400.000 (mobil Kepala dinas satu buah mobil toyota inova)

- Alat Bengkel

Alat Bengkel yang ada di Dinas Ketenagakerjaan merupakan peralatan praktek pelatihan kerja di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) yang berupa mesin las, Kompresor, mesin mobil, mesin motor ,mesin bubut, dongkrak dan lain-lain senilai Rp 1.924.542.641,31 terjadi penambahan sebesar Rp.146.559.000,00 berupa mesin generator (genset)

dan terjadi pengurangan sebesar Rp. 14.305.924,00 berupa motor pelatihan ( motor vespa dan yamaha)

- **Alat Ukur**  
Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang memiliki Alat ukur berupa 1 unit GPS (GPS with voice assistance guide) senilai Rp 7.000.000,00; terjadi penambahan dari tahun 2017 sebesar Rp.2.200.000,00 berupa Hario Drip Scale (timbangan)
- **Alat Kantor dan Rumah Tangga**  
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 nilai asset Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp 3.108.360.481,00 terjadi penambahan aset dari tahun 2017 sebesar Rp.374.088.675,00 karena ada pengadaan aset di tahun 2018 sebesar Rp.451.418.567,00 dan inventaris kantor sebesar Rp.32.284.500,00  
Dan juga terjadi Pengurangan aset (Penghapusan Aset ) sebesar Rp.109.614.391,00 berupa AC, dispenser dan Komputer dan tabung pemadam.

#### Alat Pertanian

Alat Pertanian adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Alat Pertanian berupa mesin pemotong rumput dengan anggaran sebesar Rp.5.100.000,00

#### Alat studio

Berupa alat studio dan komunikasi yaitu kamera, lcd proyektor, speaker, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.502.313.741 terjadi penambahan sebesar Rp.157.410.000,00 berupa proyektor, speaker dan TV LED.

### 3. Gedung dan Bangunan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mempunyai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan senilai **Rp 14.384.755.180,94**

#### ❖ Aset Lainnya

Akun aset lainnya merupakan aset yang tidak berwujud berupa Software Database dan sampai dengan 31 Desember 2018 senilai **Rp 157.060.000,00**.

### b) KEWAJIBAN

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tidak memiliki kewajiban atau utang.

### c) EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dengan nilai ekuitas dana yang dimiliki per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 11.886.421.120,54**

## 5.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya, berikut pos-pos yang tercantum dalam Laporan Operasional.

### a) Pendapatan LO

Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tidak ada Pendapatan Limpahan, karena Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang bukan merupakan dinas penghasil. Untuk Tahun Anggaran 2018 dinas Ketenagakerjaan terdapat defisit LO senilai Rp.21.242.514.532,00

### b) Beban

Ada 3 (tiga) jenis beban yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk tahun 2018, yaitu Beban Pegawai,

Beban Barang dan Jasa serta Beban Penyusutan dan Amortisasi. Untuk Beban Pegawai serta Beban Barang dan Jasa diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dengan nilai masing-masing Beban Pegawai sebesar Rp. 11.680.278.185,00 dan untuk Beban Barang Jasa sebesar Rp. 9.563.823.615,00, sedangkan untuk nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.0,- diperoleh dari hasil perhitungan antara harga perolehan asset tetap dengan umur ekonomis, sehingga diperoleh nilai sebesar Rp.0,- Total beban pada dinas Ketenagakerjaan untuk TA 2018 sebesar Rp. 21.244.101.800,00

c) Surplus/Defisit Operasional

Total Surplus dari Kegiatan Operasional Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang TA. 2018 defisit senilai minus Rp.21.743.644.264,86 Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengurangan antara Total Pendapatan dikurangi dengan Total Beban. Yaitu defisit sebesar minus Rp. 21.244.101.800,00

#### **5.4. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/ Defisit LO, koreksi dan Ekuitas Akhir.

a) Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang TA 2018 sebesar Rp. 10.840.092.131,54 nilai tersebut diperoleh dari Ekuitas Akhir TA 2018 sebesar Rp.11.886.421.120,54

b) Surplus / Defisit LO

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sampai dengan 31 Desember 2018 meng`alami defisit LO sebesar Rp. 21.242.514.532,00

c) Koreksi

Sampai dengan 31 Desember 2018 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tidak ada koreksi sehingga nilainya nihil.

d) Ekuitas Akhir

Sampai dengan 31 Desember 2018 Ekuitas Akhir Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sebesar Rp. 11.914.803.798,54

**BAB VI. Penutup**

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun untuk Tahun Anggaran 2018. Laporan ini kami susun sebagai bagian dari Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang per 31 Desember Tahun Anggaran 2018, dan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 .